

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

ASEAN merupakan singkatan bagi *Association of Southeast Asia Nation* yang dikenali sebagai persatuan Negara-negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN dianggotai 10 negara yang memiliki populasi penduduk berjumlah 515 juta orang yang terdiri dari berbagai bangsa, budaya dan agama dengan keluasan kawasan lebih kurang 4.5 juta kilometer persegi (Suyatno,2018,40-41). Namun, organisasi regional ini telah berkembang dengan bertambahnya anggota menjadi 11 negara, ketika ASEAN menyetujui Timor Leste untuk bergabung bersama tepat pada tanggal 11 November 2022 dengan status sebagai *observer*.

ASEAN adalah negara-negara yang bekerja sama untuk menciptakan suatu tujuan yang berdampak bagi negara masing-masing. Jika kembali ditinjau ASEAN memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi, pendidikan bagi negara-negara anggota. Dalam periode 2023, tercatat banyak kegiatan ASEAN yang dilaksanakan di Indonesia seperti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN. Selain itu, Adapun ASEAN *Chief Defense Force Meeting* (ACDFM) sebagai pertemuan tahunan Panglima seluruh anggota ASEAN, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ASEAN yang dilaksanakan di Indonesia.

Melihat hal tersebut ASEAN tidak hanya bergerak pada status bagaimana masyarakat di ASEAN menyanggah status ASEAN. Namun, lebih luas kepada kesatuan *regional* yang menyatukan *regional* tersebut melalui organisasi, kegiatan, pertemuan dalam *regional* ASEAN yang memiliki banyak perbedaan antara negara anggotanya termasuk Indonesia dengan identitas sebagai mana moto dari ASEAN itu sendiri yakni *One Vision, One Identity, One Community*. Berdasar dan mendukung peradaban dunia ASEAN tetap mengambil bagian dalam pengimplementasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainability Development Goals* (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainability Development Goals* (SDG's) merupakan kesepakatan bersama negara-negara di dunia yang mentransformasikan tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur pembangunan masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi-pihak (Triatmanto,2021,6). Masing-masing negara mempunyai cara atau metode dalam pencapaian SDGs yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat serta budaya yang berkembang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan utama diantaranya "Meningkatkan kualitas pendidikan". Berfokus pada poin ke-4 SDGs berupaya melalui banyak pertemuan dan juga program agar pendidikan yang merata dapat terwujud. Dengan adanya SDGs diharapkan dapat menjadi batu loncatan maupun landasan agar pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional dapat membuat program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mendukung dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik di Indonesia maupun ASEAN bahkan internasional.

Pendidikan merupakan bagian yang penting dengan kehidupan. Pengertian seperti ini, mungkin terkesan dipaksakan, tetapi jika mencoba mengikuti alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir (Yusuf,2018,7). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa “Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam peningkatan sumber daya manusia karena dapat mempengaruhi pertumbuhan negara dan tidak hanya mempengaruhi produktivitas tetapi juga mempengaruhi fasilitas masyarakat, sehingga lebih cepat memahami dan siap menghadapi perubahan dan juga tantangan di lingkup nasional hingga internasional. Ikeda (2019) menyatakan bahwa, *“Dialog and the promotion of the education are the keys to forming that foundation”* (Ikeda,2019,157). kutipan diatas oleh Ikeda dapat menjadi acuan bahwa pendidikan merupakan kunci yang sangat penting bagi pertahanan suatu negara. Pendidikan diberikan tidak semena-mena sebagai kewajiban saja melainkan sebagai dasar untuk mengembangkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas.

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting, hal yang harus diperhatikan oleh setiap negara di wilayah regional Asia Tenggara. Berdasarkan data UNDP dalam *Human Development Index* (HDI) per tahun 2021 diantaranya Indonesia berada di posisi 114 di dunia dengan skor 0,705. Secara umum kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak kurang lebih 8,6% yang dapat menyelesaikan pendidikan, sementara 13,7% diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun yaitu pendidikan dasar, menengah dan atas. Filipina, tingkat kegagalan murid yang menyelesaikan pendidikan di Filipina termasuk yang tertinggi, sehingga menempati posisi ke 116 di dunia dengan skor 0,699. Vietnam berada pada posisi 115 dengan skor 0,703, dimana Vietnam memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah dibandingkan Irak dan Suriah. Kamboja berada pada urutan ke 146 dengan skor 0,593.

Melihat kondisi ini, pendidikan di Kamboja menarik perhatian dengan tingkat harapan murid sebesar 11,5%, artinya hanya sekitar 5,1% yang dapat menyelesaikan pendidikan. Laos menempati urutan ke 140 dengan skor 0,607. Myanmar, yang masih dalam cengkraman kekuasaan junta militer menyebabkan Myanmar menjadi negara yang tertinggal dalam bidang pendidikan. Tercatat Myanmar menduduki posisi 149 di dunia dengan skor 0,585 dan yang terakhir adalah Timor Leste yang menduduki posisi 141 dengan skor 0,607.

Data di atas menggambarkan kondisi pendidikan yang ada di lingkup ASEAN selain beberapa negara maju dengan kualitas pendidikan yang sangat maju seperti Singapore dan Malaysia. Merujuk data diatas, maka dibutuhkan tenaga kependidikan atau sumber daya manusia yang berkapasitas maupun berkualitas.

Pendidikan dapat menjadi suatu tolak ukur dalam perkembangan sumber daya manusia yang ada di negara, oleh karena itu pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi yang ada atau perkembangan peradaban. Kemajuan global yang semakin pesat dalam perkembangan sistem yang ada saat ini juga menjadi kendala dan masalah bagi negara-negara berkembang yang secara sistem belum siap untuk melakukan pembaruan. Pendidikan yang bernilai memerlukan tenaga kependidikan yang berintegritas dan berkualitas tinggi, sehingga apa yang diberikan dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Berkaca pada salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, peningkatan tenaga kependidikan di Indonesia masih menghadapi kendala yang cukup besar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dengan banyaknya hambatan-hambatan berikut ini pertama “Rendahnya sarana fisik”, kedua “Rendahnya kualitas guru”, ketiga “Rendahnya kesejahteraan guru”, keempat “Rendahnya prestasi siswa”, kelima “Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan”, keenam “Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan”. ketujuh “Mahalnya biaya pendidikan”.



Selain itu, hambatan yang tidak bersifat material seperti semangat serta niat untuk sekolah yang kurang dan malas belajar meskipun adanya penambahan anggaran oleh pemerintah (Agustang,Mutiara,Asrifan. 2021,1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 salah satu faktor terhambatnya Pendidikan di Indonesia adalah rendahnya sarana fisik, sementara sarana prasarana secara fisik menjadi salah satu prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. Selain itu, rendahnya kualitas guru, sementara jika kualitas guru menjadi lebih baik, maka kualitas siswa akan menjadi lebih baik.

Salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 4 yaitu pentingnya peran guru dalam menunjang proses pembelajaran, yang mana pada tahun 2030 seharusnya secara signifikan meningkatkan ketersediaan guru yang sudah memiliki kompetensi yang berkualitas. Situasi pada tahun ajaran 2021/2022 menunjukkan jumlah guru mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada setiap jenjang pendidikan. Penurunan terbesar terjadi pada jumlah guru SD, yaitu sekitar 78 ribu guru tidak lagi mengajar. Meskipun jumlah guru menurun, persentase guru yang memenuhi syarat untuk mengajar meningkat pada tahun sebelumnya di setiap jenjang tingkat pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase guru yang berpendidikan minimal S1 atau D4 tertinggi berada pada jenjang SMA, sedangkan jenjang SD merupakan jenjang dengan persentase terkecil. Persentase guru yang berpendidikan minimal S1 atau D4 tingkat SMA sebanyak 98 dari 100 guru, sedangkan di tingkat SD, dari 100 guru terdapat 95 guru yang berkualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 (Statistik pendidikan, 2021,7).

Adapun indikator yang perlu diperhatikan untuk melihat sebaran layanan pendidikan yang berkualitas adalah rasio siswa dan guru. Pada tingkat SD, meskipun secara nasional rasio siswa dan guru baik, artinya tidak lebih dari angka yang ditentukan (satu guru bertanggung jawab atas 20 siswa), selain itu menurut data provinsi mempunyai tiga provinsi dengan rasio di atas angka ideal, yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Papua. Angka tersebut menunjukkan adanya penumpukan guru sekolah dasar di tingkat provinsi. Rasio terkecil terdapat di Provinsi Aceh, dimana satu guru bertanggung jawab terhadap 10 siswa. Sedangkan di Provinsi Papua, satu guru bertanggung jawab terhadap 24 siswa (Statistik pendidikan, 2021,8).

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain adalah adanya masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Rendahnya hal-hal diatas membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal tersebut dibuktikan melalui kualitas guru, sistem pembelajaran, serta kapasitas pelajarnya. Selain itu, masih terdapat banyaknya guru-guru yang kurang berkompeten, dikarenakan permasalahan teknis sekolah seperti penerimaan gaji yang kurang sesuai.

Jika hal-hal seperti ini terus terjadi tanpa adanya tindak lanjut maka pendidikan di Indonesia akan semakin memburuk terutama bagi penduduk di daerah 3T. Selain berkaca pada Indonesia negara-negara di ASEAN juga memiliki berbagai kendala dibidang pendidikan seperti Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, terkecuali negara-negara maju yang ada di ASEAN seperti Singapura.

Filipina sendiri, memberikan pernyataan melalui Wakil Presiden Sara Duterte yang mengatakan bahwa adanya survei yang membuktikan rendahnya kemampuan akademik siswa Filipina. Adapun dikatakan bahwa kurangnya infrastruktur dan sumber daya sekolah untuk mendukung proses pengajaran yang ideal, merupakan hal paling mendesak yang menimpa pendidikan dasar di Filipina. Berdasarkan data yang diberikan, inventarisasi pemerintah terkini yang menunjukkan bahwa dari 327.851 gedung sekolah disetiap tingkatan, hanya sekitar 104.536 yang masih dalam keadaan baik. Terdapat 100.072 gedung sekolah yang memerlukan perbaikan ringan, 89.525 gedung sekolah memerlukan perbaikan besar dan 21.727 gedung sekolah yang ditetapkan untuk menjalani proses hukum (Palatino,2023,1).

Dapat diketahui juga bahwa, selama pelaksanaan K-12 di Filipina dianggap memberikan beban kerja berat yang kepada guru sehingga didesak agar segera dilakukan peninjauan terhadap peraturan yang ada di sekolah umum. Oleh karena itu diganti dengan sistem baru yang bertema "*Matatag: Bansang Makabata, Batang Makabansa,*" (Bangsa untuk anak, anak untuk bangsa) dan berfokus pada reformasi kurikulum, percepatan pemberian layanan, peningkatan kesejahteraan peserta didik, dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada guru.



Keadaan politik di Filipina juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebijakan pendidikan yang ada. Beberapa sekolah ditutup disana karena dianggap krisis pendapat dan juga mengajarkan pemberontakan seperti sekolah yang ada di Mindanao. *Alliance of Concerned Teachers (ACT)* memberikan beberapa laporan terkait dengan kinerja pemerintah terhadap Pendidikan.

ACT mengingatkan aparat untuk membuktikan kemauan politiknya dalam membalikkan keterpurukan pendidikan Filipina dalam hal ini pemerintah perlu melakukan reformasi pendidikan tidak hanya sekedar seruan belaka, namun sebuah janji yang tulus untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan di masa lalu dan masa kini. Hal ini dapat diukur setidaknya dalam dua cara tahun ini. Pertama, kesediaan Duterte untuk mengajukan tuntutan yang pantas terhadap pejabat yang melakukan kesalahan yang terlibat dalam transaksi anomali dibawah pemerintahan sebelumnya. Dan kedua, komitmen Marcos untuk meningkatkan pendanaan pendidikan secara signifikan.

Masalah pendidikan di Filipina merupakan masalah multisektoral yang melibatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Beberapa poin yang dapat dilihat adalah pertama (Akses), khususnya di pedesaan, terbatasnya akses terhadap pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jarak rumah dan sekolah, kondisi jalan, transportasi umum, dan infrastruktur. Kedua (Kualitas Pengajaran) banyak sekolah di negara ini kekurangan guru yang berkualitas, fasilitas dan peralatan pengajaran yang memadai.

Ketiga (Kurangnya Pendanaan) sistem pendidikan di Filipina kekurangan dana, yang berarti terbatasnya pendanaan untuk infrastruktur dan fasilitas serta pelatihan guru yang memadai. Keempat (Kesenjangan sosial) terdapat kesenjangan pendidikan yang sangat besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara tipe ekonomi yang berbeda. Secara umum, anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan berkualitas. Keenam (Kebijakan yang tidak konsisten) Perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi berkali-kali dan kecenderungan tidak menjaga kesinambungannya, terutama pada masa simpang siurnya data pemilu, dapat berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan (Palatino,2023,2). Dengan banyaknya permasalahan pendidikan yang ada di Filipina, diperlukan adanya pembaharuan sistem dan juga keadaan sosial agar kualitas pendidikan jauh lebih baik.

Masalah pendidikan yang ada di Filipina, cukup berkaitan dengan masalah yang ada di Thailand. Namun, Thailand sendiri memiliki fokus permasalahan dalam pendidikan sehingga dilakukan beberapa penelitian terdahulu yaitu rendahnya kualitas guru yang ada di Thailand. Sepertinya, mengukur dampak kekurangan guru terhadap hasil pendidikan siswa di Thailand sebagai studi kasus dalam penelitian tersebut dibahas membahas sejauh mana kekurangan guru mengakibatkan rendahnya hasil pendidikan siswa Thailand dengan menggunakan nilai tes PISA dalam tiga mata pelajaran yaitu Membaca, Matematika, dan Sains dan menyimpulkan, membahas alokasi guru, khususnya untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil, dan ternyata hal ini harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Thailand (Pholphirul, 2023, 2-3).

Permasalahan pendidikan disebabkan karena adanya (Kesenjangan Regional), perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap pendidikan dan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan seringkali kekurangan sumber daya dan fasilitas yang memadai, (Kualitas Pengajaran) meskipun Thailand memiliki banyak sekolah dan universitas yang bagus, kualitas pengajaran seringkali tidak konsisten di seluruh negeri.

Banyak guru yang tidak memenuhi syarat atau kurang terlatih, (Kurangnya Integrasi) anak-anak dari kelompok etnis minoritas, komunitas kurang beruntung, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan belum sepenuhnya merata untuk seluruh lapisan masyarakat, (Kurikulum Tidak Relevan) Seperti yang terjadi di beberapa negara, kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan sosial seringkali menimbulkan permasalahan. Kurikulum mungkin perlu diperbarui untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, (Korupsi dalam Pendidikan), korupsi dapat menjadi masalah serius dalam sistem pendidikan Thailand, termasuk suap untuk masuk ke sekolah bergengsi dan praktik penerimaan siswa yang tidak etis, (Kurangnya Pendanaan) Meskipun pemerintah Thailand menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan, dana yang ada masih belum mencukupi untuk memperbaiki infrastruktur, membayar gaji yang layak bagi guru, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Thailand perlu melakukan reformasi pendidikan yang komprehensif, termasuk meningkatkan pelatihan guru, mengubah kurikulum, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil juga penting (The Nation 2020).

Menurut Kantor Statistik Nasional dan Unicef pada tahun 2019 sistem pendidikan di Thailand terbilang cukup baik, hampir 100 persen anak-anak telah menyelesaikan pendidikan dasar, namun hanya 65 persen yang menyelesaikan sekolah menengah atas. Laporan tersebut menyatakan bahwa 160.000 anak muda diseluruh negeri tidak dapat mengenyam pendidikan karena mereka tinggal di daerah yang sangat terpencil, sementara 30.000 anak dibawah umur tidak mendapatkan pendidikan karena mereka berada di balik tahanan karena tuduhan narkoba. Selain itu, beberapa anak di Thailand menderita masalah lain seperti kemiskinan, kehamilan atau disabilitas, yang menghambat pendidikan mereka.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa hampir 400.000 anak hidup di jalanan atau merupakan keturunan pekerja migran. Ketika anak-anak ini tidak mendapatkan pendidikan, mereka cenderung terpicat pada penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia atau kekerasan.

Masalah lain yang perlu disebutkan adalah kekurangan gizi kronis pada anak-anak dalam sistem pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, pendanaan negara untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil terlalu rendah untuk memungkinkan mempekerjakan kontraktor yang dapat menyediakan makanan bergizi (The Nation 2020).

Masalah pendidikan yang ada di Thailand bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi terutama pada peran guru dan juga gizi pada siswa/siswa. Hal ini membutuhkan kebijakan selanjutnya yang dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Selain Indonesia, Filipina, Thailand ternyata Vietnam juga memiliki permasalahan pendidikan yang cukup banyak. Sistem pendidikan di Vietnam tidak beda jauh dengan sistem di negara-negara ASEAN lainnya. Namun, sistem pendidikan Vietnam yang terlalu ketat telah menimbulkan beberapa masalah kesehatan dan sosial bagi para pelajar. Depresi dan kecemasan menjadi lebih umum di kalangan anak muda, sehingga menyebabkan angka bunuh diri yang lebih tinggi secara keseluruhan dalam dekade terakhir. Sementara itu, pendidikan dianggap sebagai salah satu sektor yang paling korup di Vietnam. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan, hal ini telah menghasilkan perbaikan positif dalam sumber daya manusia. Vietnam memiliki tingkat melek huruf yang relatif tinggi, yaitu lebih dari 95 persen, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, negara ini mencatat peningkatan jumlah investasi modal pada startup pendidikan digital. Dengan populasi generasi muda yang paham digital, pendidikan online diharapkan memiliki peran yang lebih signifikan di masa depan di negara tersebut (Statista 2023).

Menurut laporan yang di sampaikan oleh UNICEF, anak-anak Kamboja terus tertinggal di sekolah karena sejumlah alasan, termasuk tidak cukup siap untuk bersekolah, mengalami kualitas pengajaran dan pembelajaran yang buruk, dan bersekolah secara tidak teratur. Hal ini pada akhirnya menyebabkan banyak dari mereka putus sekolah sama sekali. Pembelajaran yang tidak



memadai pada tahun-tahun awal kehidupan, ditambah dengan gizi yang tidak mencukupi, menyebabkan perkembangan anak tertinggal. Jumlah guru yang berkualitas tidak mencukupi, dan kualitas lingkungan belajar buruk. Kurangnya infrastruktur dasar, seperti fasilitas air, sanitasi dan kebersihan, yang khususnya berdampak pada remaja perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas. Kekerasan merupakan masalah di sekolah, dimana guru menerapkan hukuman fisik. Anak-anak penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi. Banyak orang tua yang tidak memahami nilai pendidikan dan sebagian besar tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, terutama di daerah pedesaan dan daerah tertinggal.

Kualitas pendidikan menurut peneliti terdahulu yaitu Hanushek, Murnane dan Phillips, tergantung pada faktor. Salah satu faktor yang dianggap paling penting adalah kualitas seorang guru. Telah terbukti bahwa siswa yang diajar oleh guru berkualifikasi tinggi mempunyai hasil pendidikan yang lebih baik dibandingkan siswa yang gurunya berkualitas buruk. Kualitas guru telah lama diakui sebagai hal yang penting dalam memberikan masukan pendidikan yang efektif. Ada juga hipotesis bahwa kualitas guru merupakan prediktor kualitas pembelajaran, yang pada gilirannya mengarah pada prestasi siswa yang lebih baik. (Pholpirul, 2023, 2-3). Pentingnya kualitas guru terhadap pembelajaran siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik sosial dan ekonomi lainnya lebih berpengaruh, penelitian selanjutnya tidak setuju dan malah berpendapat bahwa kualitas guru memainkan peran penting dalam pembelajaran siswa. Mengingat peran ini, peningkatan kualitas guru merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan suatu negara.

Dalam hal ini perguruan tinggi menjadi salah satu objek yang sangat penting, karena memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan juga daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat menyediakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar. Selain itu, perguruan tinggi yang berkualitas juga akan dapat mencetak pemimpin dan pemikir suatu bangsa yang menentukan pembangunan negaranya dimasa depan. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, lembaga pendidikan dapat mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu Pendidikan diantaranya pendidik yang profesional, sejahtera dan bermantabat. Oleh karena itu keberadaan pendidik yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Sekiranya seorang tenaga kependidikan dapat berpikir seperti kutipan dibawah ini;

Clements (2019) menyatakan bahwa *If we are interested in the development of principaled, self empowered individuals, then this means that we need to pay close attention to what we are teaching and how we teach it. Whether we are teaching human rights or peace education, it is the vital that we ensure that our institution themselves are just and peaceful. This is means working to develop classrooms that become places that advance peace building and human rights.* (Clements,2019,156-157).

Untuk itu ASEAN membentuk SEAMEO sebagai wadah pengembangan pendidikan dan kebudayaan.

*The Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO)* adalah organisasi antar pemerintah *regional* yang didirikan pada tahun 1965 antara pemerintah di negara-negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerja sama dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah tersebut. SEAMEO sebagai organisasi pemerintah di Asia Tenggara yang mengemukakan pentingnya pendidikan, budaya dan ilmu pengetahuan juga memiliki visi dan misi. Visi SEAMEO adalah sebagai organisasi terkemuka untuk meningkatkan pemahaman regional dan kerja sama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk kualitas hidup yang lebih baik di Asia Tenggara. Misi nya adalah untuk meningkatkan pemahaman regional, kerja sama dan kesatuan tujuan antar negara anggota untuk kualitas hidup yang lebih baik melalui pembentukan jaringan dan kemitraan penyediaan forum antar pembuat kebijakan dan para ahli dan promosi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan (SEAMEO 2023).

Sebagai organisasi pemerintah yang bergerak langsung di bawah Kementerian Pendidikan yang ada di ASEAN, otomatis ikut mendukung Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang fokusnya salah satunya pada poin ke-4 dimana memastikan bahwa setiap orang dapat memiliki pendidikan yang baik dan layak. Oleh sebab itu, melalui salah satu program yang dilaksanakan oleh SEAMEO yaitu *SEA-Teacher* yang mana program ini mempersiapkan mahasiswa untuk ikut pelatihan secara langsung di lapangan, dengan melakukan kegiatan pengajaran sebagai *Pre-Teacher*.

Program ini dilaksanakan dengan tujuan, kualitas dan juga kapasitas dari seorang tenaga kependidikan dapat terlatih sejak masih di perguruan tinggi. Dengan rentang waktu 1 bulan, menjadi kesempatan yang sangat besar untuk melatih diri menjadi seorang guru yang professional dibidangnya dengan *subject* pengajaran yang bermacam-macam. Selain itu mitra maupun lingkup dari program *SEA-Teacher* ini, mencakup ASEAN dan non ASEAN, sehingga *Pre-Teacher* mendapatkan kesempatan untuk mengajar dan mendapatkan pengalaman secara internasional.

Sebagai bentuk dari pencapaian SDGs, di tahun 2030 PBB membutuhkan pencapaian yang tidak sedikit oleh karena itu, melalui program ini dapat membantu pencapaian SDGs tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga dalam bidang pekerjaan yang layak dan perkembangan ekonomi, karena melalui pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan inovasi-inovasi yang setidaknya dapat membantu mengurangi krisis ekonomi. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai peran dari organisasi pemerintah ini dan kontribusinya dalam pencapaian dan pengimplementasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adanya permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah kualitas tenaga pendidik di Kawasan ASEAN. Dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik ini dapat memberikan dampak yang besar bagi pendidikan yang ada di Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu melalui SEAMEO, diciptakan program *SEA-Teacher* sebagai solusi dan pelatihan kepada mahasiswa, hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata namun juga sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian SDGs dikawasan ASEAN. oleh sebab itu peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana peran *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dalam pencapaian pengimplementasian *Sustainable Development Goals* melalui program *SEA-Teacher* tahun 2019-2023?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui peran *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dalam pencapaian pengimplementasian *Sustainable Development Goals* melalui program *SEA-Teacher* dalam kurun waktu 2019-2023.
2. Mengetahui hasil pencapaian pengimplementasian *Sustainable Development Goals* poin 4 melalui program *SEA-Teacher* dalam kurun waktu 2019-2023.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional, serta memberikan wawasan dan pemahaman dalam bidang kerja sama organisasi internasional dalam lingkup *regional* dan juga pemahaman mengenai *Sustainable Development Goals* poin ke 4.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi masyarakat terkait peran *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dalam pencapaian pengimplementasian *Sustainable Development Goals* melalui program *SEA-Teacher* dalam kurun waktu 2019-2023. Penelitian ini bermanfaat untuk organisasi internasional dalam menambah data dan juga fakta terkait perannya dalam pencapaian pengimplementasian *Sustainable Development Goals* poin ke 4. Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dalam melihat pengimplementasian SDGs poin ke 4 dari pandangan yang berbeda dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi, serta dapat mengembangkan penelitian selanjutnya terhadap SDGs poin ke 4.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang peran *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) terhadap *Sustainability Development Goals*.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama yang menjelaskan tentang peran *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) terhadap *Sustainability Development Goals* dalam poin 4 dan memuat metode penelitian yang membantu mendeskripsikan masalah penelitian.

### **BAB III SOUTHEAST ASIAN MINISTER OF EDUCATION ORGANIZATION (SEAMEO), PROGRAM SEAMEO DI ASEAN DAN SDGs POIN 4**

Bab ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dan Program SEAMEO dan *SEA-Teacher* di Kawasan ASEAN.

**BAB IV      KERJA SAMA INDONESIA DAN NEGARA ASEAN DALAM  
SEAMEO DAN HASIL IMPLEMENTASI DALAM SDGs  
POIN 4 MELALUI PROGRAM SEA-TEACHER**

Bab ini peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai, kerja sama Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam mendukung SEAMEO secara spesifik, baik hubungan diplomasi antara Indonesia dan 10 negara ASEAN lainnya. Kemudian, akan menjelaskan mengenai korelasi SDGs dengan program SEAMEO yang dibagi dalam tiga bagian yaitu *Research and Development, Capacity Building, Advocacy and Partnership*. Selepas itu, akan memperlihatkan dan menjelaskan secara spesifik hasil implementasi dalam SDGs melalui program *SEA-Teacher* mulai dari kelompok pertama hingga kelompok 9 dan pencapaian SDGs ASEAN maupun Indonesia dalam rentang waktu yang ditentukan, serta membahas peluang dan tantangan dari program *SEA-Teacher*.

**BAB V      PENUTUP**

Bab ini akan menjadi bagian penutup sehingga akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait peran *Southeast Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO) dalam pencapaian pengimplementasian *Sustainability Development Goals* poin 4 melalui program *SEA-Teacher* dalam kurun waktu 2019-2023.